
PERBANDINGAN HUKUM TATA NEGARA

**Dr. Beni Ahmad Saebani, M.Si.
Ai Wati, S.Sy., M.H**

PERBANDINGAN HUKUM TATA NEGARA



**Penerbit CV Pustaka Setia
Bandung**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

Pasal 113

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

PERBANDINGAN HUKUM TATA NEGARA

ISBN 978-979-076-599-3

Cet. I: Mei 2016, 16 × 24 cm, xii + 342 halaman

Penulis: **Dr. Beni Ahmad Saebani, M.Si.
Ai Wati, S.Sy., M.H.**

Desain Sampul: **Tim Desain Pustaka Setia**

Setting, Montase, Layout: **Tim Redaksi Pustaka Setia**

Cet, 2: Oktober 2022

Diterbitkan oleh:

CV PUSTAKA SETIA

Jl. BKR (Lingkar Selatan) No. 162–164

Telp.: (022) 5210588, Faks.: (022) 5224105

E-mail: pustaka_seti@yahoo.com

Bandung 40253

(Anggota IKAPI Cabang Jawa Barat)

Copyright © 2016

Dilarang mengutip memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa seizin tertulis dari penerbit.

Hak penulis dilindungi undang-undang.

All right reserved.

PENGANTAR PENULIS

Perbandingan hukum tata negara sebagai kajian keilmuan dalam bidang hukum tata negara. Dalam lingkungan dunia ilmu pengetahuan dipergunakan dua istilah, yaitu perbandingan hukum tata negara dan hukum tata negara perbandingan. Penggunaan dua istilah tersebut digunakan dalam berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

Perbandingan hukum tata negara memperbandingkan hukum tata negara di berbagai negara dan berbagai sistem pemerintahannya untuk mengetahui persamaan dan perbedaan sistem hukum tata negara yang dianut dan diaplikasikan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan negara masing-masing.

Saat ini literatur mata kuliah perbandingan hukum tata negara masih jarang. Adapun perbandingan hukum tata negara merupakan salah satu mata kuliah yang dikaji oleh mahasiswa ilmu hukum tata negara, bahkan dipelajari oleh semua kalangan akademisi masyarakat umum yang ingin mendalami hukum tata negara dengan pendekatan komperatif antarnegara.

Buku *Perbandingan Hukum Tata Negara* ini hadir untuk memperkaya literatur yang telah ada, yang disusun dengan bahasa yang sederhana agar mudah dipahami oleh penggunanya. Uraian buku ini dimulai dengan kajian terminologis mengenai perbandingan hukum tata negara dan pengertian tata negara tersebut serta ruang lingkupnya. Pemahaman tentang perbandingan hukum tata negara dititikberatkan pada pendekatan yang digunakan oleh para ahli hukum tata negara dengan memerhatikan

hubungan antarilmu pengetahuan dalam bidang hukum serta faktor yang memengaruhi ketatanegaraan dan bentuk ketatanegaraan yang terdapat di berbagai negara di dunia. Kajian lainnya adalah mengenai struktur ketatanegaraan berdasarkan asas demokrasi dan diktatoriat, struktur ketatanegaraan menurut C.F. Strong, hakikat konstitusi, hakikat kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, struktur ketatanegaraan menurut Maurice Duverger, dan struktur ketatanegaraan di Indonesia.

Semoga buku ini bermanfaat untuk mengembangkan pemahaman ilmu hukum tata negara dan menjadi bagian dari pengayaan ilmu pengetahuan di bidang hukum.

**Dr. Beni Ahmad Saebani, M.Si.
Ai Wati, S.Sy.,M.H.**

DAFTAR ISI

BAB 1

PENDAHULUAN	1
A. Selayang Pandang Mengenai Perbandingan Hukum Tata Negara	1
B. Hukum dan Negara Hukum	3
C. Pengertian Hukum Tata Negara	5

BAB 2

PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP PERBANDINGAN HUKUM TATA NEGARA	11
A. Pengertian Perbandingan Hukum Tata Negara.....	11
B. Ruang Lingkup Kajian Perbandingan Hukum Tata Negara	17
C. Kedudukan dan Hubungan Perbandingan Hukum Tata Negara dengan Ilmu Negara dan Hukum Tata Negara	17
D. Metode Perbandingan Hukum Tata Negara	23
E. Tujuan Ilmu Perbandingan Hukum Tata Negara	25
F. Faktor yang Memengaruhi Ketatanegaraan dan Berbagai Bentuk Ketatanegaraan di Dunia	28

BAB 3

STRUKTUR DAN POLA KETATANEGARAAN DALAM BERBAGAI ASPEK	33
A. Struktur Ketatanegaraan Berdasarkan Asas Demokrasi dan Diktator	33
B. Struktur Ketatanegaraan Menurut C.F. Strong.....	34
C. Hakikat Konstitusi	39
D. Hakikat Kekuasaan Legislatif	51
E. Hakikat Kekuasaan Eksekutif	55
F. Hakikat Kekuasaan Yudikatif atau Kekuasaan Peradilan	56
G. Struktur Ketatanegaraan Menurut Maurice Duverger	57
H. Struktur Ketatanegaraan di Indonesia	61

BAB 4

DEMOKRASI SEBAGAI ASAS DALAM HUKUM TATA NEGARA DI BANYAK NEGARA DI DUNIA.....	75
A. Pengertian Demokrasi sebagai Asas dalam Hukum Tata Negara.....	75
B. Sejarah dan Perkembangan Demokrasi.....	80
C. Sistem Pemerintahan Demokrasi.....	88
D. Perkembangan Demokrasi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Berbagai Negara Lain.....	96
E. Demokrasi Konstitusional (Konsep Negara Hukum Demokratis).....	105
F. Negara Demokrasi Konstitusional	108
G. Dinamika Implementasi Demokrasi dan Nomokrasi	109
H. Demokrasi dalam Sistem Hukum Islam	111

BAB 5

PERBANDINGAN KONSTITUSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DARI MASA KLASIK SAMPAI MASA MODERN	113
A. Pengertian, Kedudukan, dan Ruang Lingkup Konstitusi.....	113
B. Konstitusi dan Konstitusionalisme Klasik.....	124

C.	Konstitusionalisme dan Piagam Madinah.....	129
D.	Konstitusi dan Konstitusionalisme Modern.....	131
E.	Supremasi Konstitusi.....	133
F.	Konstitusi sebagai Pemersatu	135
G.	Macam-macam dan Klasifikasi Konstitusi	136
H.	Perubahan Konstitusi di Berbagai Negara	137

BAB 6

KETATANEGARAAN DALAM BERBAGAI SISTEM

PEMERINTAHAN	145	
A.	Pengertian Sistem Pemerintahan	145
B.	Ketatanegaraan dalam Sistem Pemerintahan Presidensial	148
C.	Ketatanegaraan dalam Sistem Pemerintahan Parlementer	153
D.	Perbandingan Sistem Pemerintahan Presidensial dan Parlementer.....	158
E.	Ketatanegaraan dalam Sistem Pemerintahan Campuran atau Referendum.....	170
F.	Ketatanegaraan dalam Sistem Pemerintahan Komunis	174
G.	Ketatanegaraan dalam Sistem Pemerintahan di Negara Mayoritas Islam	177
H.	Ketatanegaraan dalam Sistem Islam dan Negara Islam	180

BAB 7

IMPLEMENTASI KETATANEGARAAN DALAM ISLAM DAN NEGARA ISLAM.....

189		
A.	Ketatanegaraan pada Masa Nabi Muhammad SAW.	189
B.	Ketatanegaraan pada Masa Al-Khulafa' Al-Rasyidun	194
C.	Ketatanegaraan pada Masa Bani Umayyah	199
D.	Ketatanegaraan pada Masa Bani Abbas	201
E.	Ketatanegaraan pada Masa Turki Usmani.....	201

BAB 8

**PERBANDINGAN KETATANEGARAAN DI BEBERAPA NEGARA
DI DUNIA..... 205**

- A. Hukum Ketatanegaraan Indonesia..... 205
- B. Hukum Ketatanegaraan Belanda 209
- C. Hukum Ketatanegaraan Prancis 213
- D. Hukum Ketatanegaraan Amerika Serikat 219
- E. Hukum Ketatanegaraan Jepang 223
- F. Hukum Ketatanegaraan Jerman..... 230
- G. Hukum Ketatanegaraan Inggris..... 235
- H. Hukum Ketatanegaraan Malaysia 241
- I. Hukum Ketatanegaraan Cina 245
- J. Hukum Ketatanegaraan Spanyol 247
- K. Hukum Ketatanegaraan Singapura 249
- L. Hukum Ketatanegaraan India 251
- M. Hukum Ketatanegaraan Korea Utara 253
- N. Hukum Ketatanegaraan Thailand 258
- O. Hukum Ketatanegaraan Australia 259
- P. Hukum Ketatanegaraan Vietnam 260
- Q. Hukum Ketatanegaraan Filipina 261
- R. Hukum Ketatanegaraan Afganistan 263
- S. Hukum Ketatanegaraan Israel..... 264
- T. Hukum Ketatanegaraan Rusia..... 265

BAB 9

KONSTITUSI DARI BEBERAPA NEGARA 269

- A. Konstitusi Negara Madinah..... 269
- B. Konstitusi Republik Indonesia..... 283
- C. Konstitusi Negara Republik Amerika Serikat..... 305
- D. Konstitusi Jepang 318

DAFTAR PUSTAKA 337

PROFIL PENULIS 341